

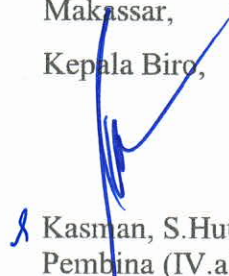
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk Periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Rencana Kerja ini merupakan gambaran arah dan tujuan awal dari proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan meningkatkan efektivitas tata kelola dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi utama Sekretariat Daerah Tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberi masukan dalam rangka perbaikan terhadap penyusunan Rencana Kerja Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.

Makassar, 2024
Kepala Biro,


Kasman, S.Hut., M.M.
Pembina (IV.a)
NIP 198410292005021001

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR.....

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan.....

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

2.2 Analis kinerja pelayanan perangkat daerah.....

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....

BAB V. PENUTUP.....

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RENJA OPD berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, berpedoman pada Rencana Strategis OPD. Renja saling berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat sebagai tujuan terselenggaranya pemerintah daerah. Peyusunan Renja yang berkualitas akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan rencana kerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulawesi Selatan tahun 2024 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara No. 4438);

- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan rencana kerja ini adalah :

1. Untuk menjabarkan Renstra Perangkat Daerah untuk pemenuhan target Visi Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, dan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi;
3. Menyelaraskan rencana strategis daerah dengan Renja Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah.

Adapun tujuan dibuatnya Renja Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

1. Sebagai pengendali kegiatan di Biro Pengadaan Barang/Jasa agar terarah dan sesuai dengan Visi, Misi, Strategis, Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan.
2. Tercapaiannya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dengan pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif;
3. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah yang terpadu dengan indikator capaian.
4. Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun anggaran Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda dan sebagai dasar penentuan KUA dan PPAS, serta RKA tahun 2025.
5. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan Biro Pengadaan Barang/Jasa.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

21. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

22. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

23. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

24 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

25 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 31. Telaahan terhadap kebijakan Nasional,** telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 32. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah,** perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024

2.1.1 Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Dalam rangka meningkatkan kualitas Penyusunan Rencana Kerja yang lebih baik, efektif dan akuntabel, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan serta menjadi referensi dalam melakukan langkah-langkah perbaikan. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan Perencanaan Pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2023 yang meliputi :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
6. Kebijakan/tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 dapat disimpulkan secara umum bahwa pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berjalan dengan baik dan telah memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan. Alokasi anggaran belanja Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 3.573.906.217 dengan realisasi keuangan Rp. 3.225.188.063 atau 90,24% dan realisasi fisik 98,69% dengan jumlah 2 Program, 8 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan.

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program adalah Adanya refocusing anggaran untuk pembayaran utang

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Adanya Jumlah target yang tinggi dan terbatasnya waktu untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan berimplikasi terhadap tidak tercapainya target kinerja sasaran dan kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023.

3. Kebijakan/tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

- a. Hendaknya kegiatan yang tidak memenuhi target tetap diprioritaskan dan dimasukkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya;
- b. Perubahan target capaian kinerja di akhir periode Renstra;
- c. Perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan.

2.1.2 Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah untuk Triwulan IV Tahun 2023

Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan untuk 2023 terdiri dari 2 (dua) Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan. Pada Triwulan I evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2022 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.670.411.017,- realisasi sebesar Rp. 1.448.319.247,- atau keuangan 86.70%.
2. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.903.495.200,- realisasi sebesar Rp. 1.776.868.816,- atau keuangan 93.35%.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah 2022
Provinsi Sulawesi Selatan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan(Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)		Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1)	Target Capaian Rasionalisasi Target Renstra (%)
			Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp		
12		3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	% Kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana	100%	3.157.866.200,00	0		0		0			100%		1,0	
		% Kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa	100%								100%				
4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	1.175.716.700											
4.01.07.1.01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan	4 Laporan	100.854.800								4	47.335.000	4	
4.01.07.1.01	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	937.234.000								4	650.000.000	4	
4.01.07.1.01	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	137.627.900								12	29.249.000	12	
4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Laporan	973.432.400											
4.01.07.1.02	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	4 Laporan	457.731.300								4	301.923.500	4	
4.01.07.1.02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	442.023.400								4	410.581.400	4	
4.01.07.1.02	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	73.677.700								12	45.279.300	12	
4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah Dokumen Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5 Dokumen	1.008.717.100											
4.01.07.1.03	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	120 Orang	502.854.000								40	206.369.700	40	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan(Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)		Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1)	Target Capaian Rasionalisasi Target Renstra (%)
			Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.07.1.03	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	275.370.700								4	152.892.500	4	
4.01.07.1.03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	230.492.400								4	59.864.800	4	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	100	3.410.302.211								100			
		Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	100								100				
		Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	100%								100				
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	106.861.400								4			
4.01.01.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	106.861.400								2	17.500.000	2	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	3 Unit	1.384.441.400											
4.01.01.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.814.000								2	5.792.000	2	
4.01.01.1.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	778.881.000								25	301.004.000	25	
4.01.01.1.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	596.746.400								4	353.369.000	4	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Laporan	270.750.000											
4.01.01.1.07	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	270.750.000								1	-	0	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Laporan	1.149.868.412											
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	62.981.500								4	39.101.300	4	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan(Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)		Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1)	Target Capaian Rasionalisasi Target Renstra (%)
			Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.086.886.912								4	608.798.367	4	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Unit	498.380.999											
4.01.01.1.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	163.139.999								15	252.418.250	15	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	77.841.000								30	38.250.000	30	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	257.400.000								1	54.178.100	1	

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2029 dan Renstra Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2029. Kegiatan yang dijadikan indikator kinerja aspek pelayanan yaitu :

1. Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
2. Jumlah Laporan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
3. Jumlah Dokumen Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
4. Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5. Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum
6. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Adapun seluruh capaian kinerja yang diuraikan dalam capaian sasaran strategis dan hasil pengukuran indikator kinerja dapat dilihat pada tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Pengadaan Barang/Jasa
Setda Provinsi Sulawesi Selatan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Restra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	9	10		11		12	13
1	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Dok.	4 Dok.	4 Dok.	0	0	0	4 Dok.	4 Dok.	4 Dok.	
2	Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum			3 Unit	3 Unit	3 Unit	0	0	0	3 Unit	3 Unit	3 Unit	
3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8 Lap.	8 Lap.	8 Lap.	0	0	0	8 Lap.	8 Lap.	8 Lap.	
4	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8 Lap.	8 Lap.	8 Lap.	0	0	0	8 Lap.	8 Lap.	8 Lap.	
5	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah			3 Unit	3 Unit	3 Unit	0	0	0	3 Unit	3 Unit	3 Unit	
6	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	0	0	0	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	
7	Jumlah Laporan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	0	0	0	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	
8	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			5 Dok.	5 Dok.	5 Dok.	0	0	0	5 Dok.	5 Dok.	5 Dok.	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan OPD

Secara umum kinerja pelayanan Perangkat Daerah Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan sudah menunjukkan hasil yang optimal, baik dari pencapaian sasaran kinerja RPJMD. Namun demikian, masih terdapat isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan terkait kinerja pelayanan Perangkat Daerah yaitu :

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
- b. Pengembangan Sistem Informasi yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa
- c. Pencapaian tingkat kematangan UKPBJ
- d. Pendampingan terhadap layanan hukum

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulawesi Selatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Biro Pengadaan Barang/Jasa dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya adalah:

- a. Perlunya penambahan Sumber Daya Manusia
- b. Perlunya Pengembangan Sistem Informasi
- c. Perlunya Tenaga Ahli di Bidang Hukum (Pengadaan Barang dan Jasa)

2.3.3 Dampak isu-isu strategis terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Capaian Program Nasional

Dampak yang ditimbulkan dari adanya isu-isu strategis Bidang Pengelolaan Layanan Secara Elektronik, yaitu kurang maksimalnya Kinerja Perangkat Daerah dalam mengelola data pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Adapun tantangan yang dihadapi Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia
2. Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat
3. Penguatan peran ASN dalam mendalami
4. Masih kurangnya SDM di Bidang Pengadaan Barang/Jasa
5. Belum terintegrasinya Aplikasi pada Biro Pengadaan Barang/Jasa
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan UKPBJ dalam pencapaian tingkat kematangan UKPBJ.

Sedangkan peluang yang bisa diambil Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

1. Terlaksananya Bimtek OPD bidang Pengadaan Barang dan Jasa
2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengaduan publik
4. Terlaksananya Pendampingan Hukum bidang Pengadaan Barang dan Jasa
5. Tersedianya sarana peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
6. Pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
7. Komitmen semua unsur Biro Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas.

2.3.5. Formulasi isu-isu penting / rekomendasi SDGs

Dari penjabaran isu – isu penting di atas, dapat direkomendasikan hal –hal sebagai berikut sebagai alternatif /upaya pemecahan masalah, yaitu Perlunya peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dalam mengelola data pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

Program dan kegiatan Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan SDGs, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- c) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa

Kegiatan :

a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Sub Kegiatan :

- a) Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
- b) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
- c) Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa

b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Sub Kegiatan :

- a) Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik
- b) Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
- c) Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Sub Kegiatan :

- a) Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
- b) Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
- c) Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capainnya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan, di samping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan dilaksanakan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 2 Program, 8 kegiatan dan 19 sub kegiatan.

Berdasarkan tabel T-C. 31 maka hasil review terhadap rancangan awal RKPD Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Hasil analisis kebutuhan RKPD tahun 2025 dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 2.916.932.425,-

B. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Hasil analisis kebutuhan RKPD tahun 2025 dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 3.351.494.120,-

Penjabaran dari rancangan awal Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel T-C. 31 berikut ini:

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam hal usulan Program dan kegiatan masyarakat untuk tahun 2025 terdapat program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota, namun usulan tersebut tidak dalam kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

akan melanjutkan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional untuk memantapkan pemulihan ekonomi dan system kesehatan menuju transformasi ekonomi yang inklusif. Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2024 adalah “**Peningkatan Produktivitas untuk tranformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan**”. RKP tahun 2022 mencakup 7 (tujuh) prioritas nasional yaitu :

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi, serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dan visi kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2024-2029 khususnya pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulawesi Selatan. Dengan mengetahui tujuan yang akan ditetapkan, maka Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulawesi Selatan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Karena merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sasaran harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan tujuan perangkat daerah sendiri yang terkait dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.

Adapun rumusan tujuan Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulawesi Selatan pada Renstra Sekretariat Daerah 2024-2029 yang ingin dicapai adalah:

“Meningkatkan efektivitas tata kelola dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi utama Sekretariat Daerah”.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, dirumuskan sasaran yang merupakan bagian integral dalam proses Perencanaan Strategis, yang berfokus kepada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Sasaran yang dimaksud adalah:

“Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah”

Berdasarkan dari tujuan dan sasaran, output capaian kinerja yang ingin dicapai Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Persentase Kepuasan pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan jumlah capaian yang ingin dicapai sebesar 100%
 - Persentase Kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana dengan jumlah capaian yang ingin dicapai sebesar 100%.
2. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
 - ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik dengan jumlah capaian yang ingin di capai sebesar 100.
 - Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah dengan jumlah capaian yang ingin di capai sebesar 100%.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan program yang akan dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sulawesi Selatan menitikberatkan pada pencapaian keberhasilan output dan outcome dalam bidang Biro Pengadaan Barang/Jasa. Program yang disusun merupakan suatu rangkaian rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa dalam jangka satu tahun.

Pada Tahun 2025 merupakan tahun kedua Renstra yang mana terdapat Perubahan Rencana Strategis yang disebabkan oleh diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga pada penyusunan Renja Perubahan 2025 ini akan menggunakan hasil Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, maka dengan itu Biro Pengadaan Barang/Jasa menetapkan 2 Program, 8 Kegiatan, dan 19 Subkegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 6.568.168.411 (Enam Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sebelas Rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan diuraikan pada tabel T.C.33 berikut:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2025
Dan Perkiraan Maju Tahun 2026

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025 berisi rancangan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun 2025.

Pada bab penutup Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Selanjutnya Rencana Kerja ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025. Prioritas program/kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi juga diarahkan guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Namun demikian besaran pagu anggaran setiap program/kegiatan/sub Kegiatan menyesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus di kedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan, mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

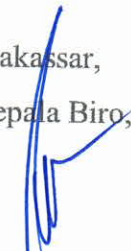
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan, dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan instrumen pengendalian tersebut, diharapkan terjadi kesesuaian antara perencanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam target capaian pada setiap tahapan dengan pelaksanaannya, dan apabila terjadi ketidaksesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang.

Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Komitmen, konsistensi, disiplin, kerja keras, semangat, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan mutlak diperlukan untuk tercapainya sasaran Perangkat Daerah tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan sebagai landasan, pedoman dan acuan penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.

Makassar, 2024
Kepala Biro,


Kasman, S.Hut., M.M.
Pembina (IV.a)
NIP 198410292005021001